



**PENERAPAN TIPE IDEAL BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK  
DI KANTOR DESA MOLAS KECAMATAN BONGOMEME  
KABUPATEN GORONTALO**

**Cindra Abdullah<sup>1</sup>, Yakob Noho Nani<sup>2</sup>, Rustam Tohopi<sup>3</sup>**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo<sup>1</sup>

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo<sup>2</sup>

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo<sup>3</sup>

e-mail:

[ciciabdullah09@email.com](mailto:ciciabdullah09@email.com)<sup>1</sup>, [yacobnani@ung.ac.id](mailto:yacobnani@ung.ac.id)<sup>2</sup>, [rustam@ung.ac.id](mailto:rustam@ung.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out (1) how to implement the ideal type of bureaucracy in public services at the Molas Village Office, Bongomeme Subdistrict, Gorontalo Regency, and (2) the factors that influence the implementation of the bureaucratic ideal type in public service at the Molas Village Office, Bongomeme Subdistrict, Gorontalo Regency. The research method uses a qualitative approach to data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques are recording, reduction, display, and verification to conclude.*

*The results of the research found in the field that (1) application of the ideal type of bureaucracy in public service at the Molas Village Office, Bongomeme District, Gorontalo Regency that the division of labour is correct, apparatus is given and placed in fields with clear jobs. The principle of hierarchy of authority is well marked by the existence of a structure in the government system that is formed according to the needs of the village government. Impersonal relations have been good, including the relationship between the community and village officials and the relationship between village government officials. The selection of personnel based on career has not been implemented. (2) the factors that determine the application of the ideal type of bureaucracy in public service at the Molas Village Office, Bongomeme District, Gorontalo Regency are that the SOP system is good, the authority system is not good, the hierarchical system is good.*

**Keywords:** *Ideal type of bureaucracy, public services*

## PENDAHULUAN

Birokrasi bagi Negara adalah komponen penting apalagi bagi masyarakat modern, dalam suatu negara sudah dipastikan ada birokrasi yang tidak bisa dihindarkan karena birokrasi merupakan hal utama yang ada secara nyata sebagai tugas utama negara atau pemerintah untuk memberikan pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sebab negara dituntut untuk selalu menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat.

Thoah (dalam Ramadhanti 2018) mengatakan istilah birokrasi sering kali dikaitkan dengan organisasi pemerintah, sehingga seringkali birokrasi diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat, yaitu suatu kerajaan yang rajanya adalah pejabat. Di dalamnya terdapat yurisdiksi, yaitu setiap pejabat memiliki official duties, mereka bekerja pada tatanan hierarki dengan kompetensi masing-masing, pola komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis.

Menurut Ndraha (dalam Endah dan Vestikowati 2021) birokrasi pemerintahan sebagai struktur organisasi pemerintahan yang memproduksi layanan civil dan jasa publik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan lingkungan. Pemerintah selaku provider harus mengantarkan dan menyerahkan produk itu sampai ditangan customer pada saat dibutuhkan atau sebaliknya.

Max Weber (dalam Risnawan 2018) memberikan pengertian birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan

dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan. Birokrasi ini dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak.

Birokrasi selalu berkaitan dengan pelayanan publik, baik dalam pemerintahan tingkat pusat, daerah, kecamatan sampai pada tingkat desa selalu ada birokrasi di dalamnya. Semakin banyaknya urusan masyarakat semakin terlihat fungsi birokrasi itu sendiri.

Pelayanan publik menurut Widodo (dalam Dewi dan Suparno 2022) merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi tersebut sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik merupakan pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat pada penyelenggaraan negara.

Dalam konteks pelayanan publik menurut Moenir (dalam Harsono 2019) adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pelayanan publik bisa memiliki artian melakukan pelayanan kepada rakyat atau masyarakat. Tetapi secara prinsip, pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan dalam bidang kesehatan, pendidikan, usaha, perhubungan dan lain

sebagainya. Berbagai macam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan bukti bahwa birokrasi merupakan kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh pemerintah dan juga masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhannya. Pemenuhan pelayanan harus dilakukan dan diberikan kepada masyarakat yang menjadi dasar kebutuhannya.

Pelayanan yang baik tidak hanya pelayanan pada bidang administrasi atau surat menyurat. Namun pelayanan dalam meningkatkan kualitas hidup secara layak. Pada survey awal peneliti menemukan bahwa di kantor desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa, pembagian posisi dan jabatan ini belum cukup baik, pada wawancara awal bahwa pemerintah desa Molas mengatakan bahwa pegawai yang bekerja masih sedikit sehingga mengakibatkan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan atau dibagi untuk dua orang harus dikerjakan oleh satu orang, dengan kata lain pegawai harus bekerja diluar tugas dan jabatan yang dia terima, mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan menjadi menumpuk. Meskipun di Kantor Desa Molas sudah ada struktur pemerintah, akan tetapi belum ada pengawasan yang ketat dan menyeluruh terhadap struktur organisasi sehingga mengakibatkan pegawai menjadi tidak disiplin. Selain itu masih ditemukan bahwa pelayanan di Kantor Desa Molas masih nepotisme atau mendahulukan kepentingan pribadi sehingga banyak masyarakat yang mengeluh tentang kualitas pelayanan yang ada disana. Dan permasalahan terakhir yaitu pemilihan personil tidak ditetapkan berdasarkan jenjang karir.

Dari uraian permasalahan di atas maka peneliti menetapkan tujuan dari penelitian ini untuk Mengidentifikasi 1) Penerapan Tipe Ideal Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo di lihat dari aspek: pembagian kerja yang jelas, Hirarki Wewenang, Hubungan Impersonal dan Pemilihan Personil Berdasarkan Karir. 2) faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Tipe Ideal Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo di lihat dari aspek: sistem SOP. Sistem Kewenangan, dan Sistem Hirarki.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Narasumber dalam penelitian ini adalah Perangkat Molas. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposive memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Teknik Analisis Data menggunakan Pencatatan data, Reduksi Data, Display Data, Verifikasi Data dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Tipe Ideal Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo Pembagian Kerja**

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo sudah ada pembagian kerja

yang jelas dan tepat, masing-masing aparat pemerintah desa dibagi atas tugas dan fungsi sesuai dengan struktur pemerintah yang disusun. Pemerintah desa Molas mengetahui masing-masing dari tugas dan fungsi yang akan mereka jalankan, dari kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kasi pemerintahan, kasi kesra dan pelayanan, kaur umum dan perencanaan sampai kepada kepala-kepala dusun pun tahu bahwa ada tugas yang harus mereka laksanakan dan itu merupakan tanggung jawab dari masing-masing aparatur yang dibagi sesuai dengan tugas dan fungsi mereka.

### **Prinsip Hirarki Wewenang**

Menurut Max Weber (1947) ciri khas birokrasi adanya wewenang yang disusun secara hirarki dan berjenjang. Hirarki membantu pimpinan birokrasi untuk melakukan supervisi dan kontrol terhadap para anggotanya juga memiliki potensi menghasilkan serangkaian masalah birokrasi.

A Buchari (2018) mengungkapkan bahwa Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hirarki, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih di atas. Pejabat yang lebih rendah kedudukannya harus mempertanggungjawabkan setiap keputusannya kepada pejabat atasannya.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Putri Aleah Antasa (2022) yang mengatakan bahwa setiap pekerjaan yang diberikan haruslah dipertanggungjawabkan secara langsung kepada pemimpin.

Dari hasil penelitian di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo

ditemukan bahwa, sudah ada struktur yang ada di Kantor Desa Molas, yang disusun dari kepala desa, sekretaris desa, dan kepala-kepala bidang, termasuk kepala bidang keuangan, kepala bidang pemerintahan, kepala bidang kesejahteraan masyarakat dan pelayanan, kepala bidang umum dan perencanaan kemudian ada kepala-kepala dusun, yang terdiri dari kepala dusun Molteng, kepala dusun Buade, kepala dusun Tapahuhito, Kepala dusun Kamiri. Kemudian, aparatur pemerintah desa juga bekerja dan bergerak sesuai dengan wewenang yang diperitahkan oleh kepala desa, termasuk pada pelayanan, sehingga dalam pengevaluasian kepala desa tahu apa yang harus masing-masing aparatur pemerintah desa pertanggungjawabkan, maka kepala desa selalu meminta laporan tertulis guna untuk melihat kinerja aparat pemerintah desa.

Senada dengan penelitian Ramdani (2020) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip hirarki dapat diartikan sebagaimana petugas yang lebih rendah akan tunduk kepada pejabat yang lebih tinggi sehingga akan mempermudah pembinaan dan pengawasan pekerjaan serta memberikan pelayanan sesuai dengan waktu yang diharapkan oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan. Karena hal tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan perizinan.

### **Hubungan Impersonal**

Menurut Albrow (1989) Prinsip impersonalitas untuk mendorong agar para birokrat dapat bertindak adil dan bersikap nonpartisipan dalam melayani masyarakat. pejabat yang ideal dalam suatu

birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalitas impersonality (formal nonpribadi), artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Dalam prinsip ini, seorang pejabat dalam melaksanakan tugas jabatannya terlepas dari pertimbangan yang bersifat pribadi. Dengan menghilangkan pertimbangan yang bersifat pribadi dalam urusan jabatan, berarti suatu prakondisi untuk sikap tidak memihak dan juga untuk efisiensi. Perilaku birokrasi merupakan interaksi antar karakter individu dengan birokrasi (Nani et al 2021).

Menurut Dwiyanto (2011) prinsip impersonal dapat mendorong pejabat birokrasi bertindak adil dan bersikap objektif serta netral dalam memberikan pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat Max Weber bahwa hubungan impersonal birokrasi harus memiliki orientasi yang impersonal. Pegawai pemerintah harus terhindar dari kepentingan pribadi dalam hubungan kepada bawahannya atau melayani masyarakat. hubungan impersonal yang dikembangkan untuk mendorong para birokrat dapat bersikap adil dan nonpartisan dalam melayani Masyarakat.

Sesuai dengan penelitian Hardianti, Mustari N. dan Parawu H.E (2018) bahwa hubungan impersonal itu sangat mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat, semakin baik hubungan impersonal maka semakin meningkat pula kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan di Kantor desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo bahwa hubungan impersonal

yang ada dalam kantor desa berjalan sangat baik, dimana aparatur pemerintah selalu membantu mengerjakan pekerjaan aparatur lain ketika ia mengalami kendala dalam penyelesaian, misalnya aparatur tersebut tidak dapat hadir tetapi ada pekerjaan yang harus diselesaikan maka aparatur lain akan membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Selain hubungan dilingkungan kerja yang dijalin dengan sangat baik, hubungan antara masyarakat dan aparatur pun berjalan dengan sangat baik, pemerintah desa Molas selalu mengupayakan dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan merata. Dalam hal pelayanan dimana diterapkan sistem mengantri terlebih dahulu, pelayanan diberikan kepada siapa yang lebih dulu datang meminta pelayanan bukan melihat sistem kedekatan keluarga atau nepotisme. Pelayanan pun dilakukan bukan hanya sekedar adil, tetapi seadil-adilnya dimana ketika ada pelayanan yang melibatkan banyak masyarakat seperti penyaluran dana bantuan sosial maka yang lebih dulu diberikan pelayanan bukan lagi yang lebih dahulu datang, tetapi mendahulukan lansia atau orang tua sebab lansia lebih rentan cepat lelah ketika menunggu sedikit lebih lama, setelah lansia maka akan dilakukan pelayanan kepada yang lebih dulu datang.

### **Pemilihan Personil Berdasarkan Karir**

Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo bahwa pemilihan personil berdasarkan jenjang karir ini belum terlaksana atau pemilihan aparatur pemerintah desa belum berdasarkan karir. Aparatur pemerintah desa yang

bekerja di kantor desa Molas Kecamatan Bongomeme tidak dipilih berdasarkan karir, namun berdasarkan kemampuan yang diasah ketika melakukan pekerjaan. Artinya, aparatur pemerintah desa Molas ketika sudah mulai bekerja maka dilakukan pelatihan terlebih dahulu tentang suatu pekerjaan yang akan mereka kerjakan.

Dari uraian tersebut terungkap bahwa pemilihan personil berdasarkan karir belum diterapkan, yang menjadi basis utama untuk menjadi aparat pemerintah desa adalah keinginan untuk menjadi anggota dari aparat desa, kemudian untuk menambah skill atau pun kemampuan maka wajib mengikuti pelatihan-pelatihan yang di adakan. Menurut Bevir (2007; 752) Profesionalisasi mengacu pada suatu proses untuk mendorong dan melindungi kepentingan pemangkuan jabatan secara profesional.

Max Weber (1947: 331) dan Rosenbloom & Kravchuk (2005: 209) menegaskan bahwa untuk memperoleh birokrat yang profesional maka calon pejabat diseleksi menurut kualitas tekniss dan bebas dari intervensi politik. Di Kantor Desa Molas pemilihan pegawai berdasarkan karir belum di laksanakan, karena kualitas Sumber Daya Manusia yang masih kurang. Sedangkan Yates (2009: 88-90) menyatakan bahwa di dalam birokrasi, profesionalisasi mengacu pada pengembangan tipe dan level pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk perilaku profesional.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tipe Ideal Birokrasi Dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo**

### **Sistem SOP**

Untuk berjalannya suatu sistem pemerintahan maka wajiblah memiliki buku pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) termasuk dalam hal Pelayanan Publik. Tohopi R (2019) mengatakan bahwa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu memperhatikan komponen-komponen pelayanan yang meliputi: prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta keahlian pemberi pelayanan.

Keterkaitan peneliti dengan hasil penelitian Faturrahman (2016) bahwa standar operasional prosedur (SOP) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan tipe ideal birokrasi. Hasil penelitian di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo bahwa untuk menjalankan suatu birokrasi yang ideal, diterapkan sistem Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pekerjaan, begitupun dalam setiap pemberian pelayanan. Setiap kepengurusan penyelesaian pelayanan diberikan Standar Operasional Prosedur yang harus dipenuhi sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan pelayanan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Begitu pun dalam penyelesaian pekerjaan, di terapkan sistem Standar Operasional Prosedur sehingga dengan mudah aparatur pemerintah menyelesaikan pekerjaan mereka.

### **Sistem Kewenangan**

Menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar, wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau

perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa dalam wewenang pemerintah itu tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan pemerintahan tersebut.

Keterkaitan peneliti dengan hasil penelitian Fatturahman (2016) bahwa Sistem kewenangan mampu mempengaruhi penerapan tipe ideal birokrasi. Hasil penelitian di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo bahwa sistem kewenangan tersebut dijalankan belum cukup baik sesuai dengan hukum yang berlaku dan struktur organisasi pemerintahan yang dibentuk, artinya sesuai undang-undang nomor 6 tahun 2004 bahwa pemerintah desa berwenang memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dalam pemerintah desa Molas diterapkan dan dijalankan sesuai dengan kewenangan dari masing-masing aparatur pemerintah desa Molas, Wewenang aparatur pemerintah desa Molas dijalankan sesuai dengan struktur jabatan yang diberikan, masing-masing aparatur pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sehingga menciptakan pelayanan yang baik. Akan tetapi dalam pengambilan keputusan selalu diberikan kepada kepala desa sebagai pemilik kekuasaan tertinggi di tingkat desa sehingga peran kepala desa lebih menonjol

## **Sistem Hirarki**

Rosmiati dan Kurasein (2021) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa struktur organisasi merupakan tugas dan tanggung jawab individu dan kelompok yang satu dengan yang lainnya mengenai kerangka keseluruhan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan yang berkoordinasi satu sama lain atas kegiatan yang dilakukan guna mencapai tujuan organisasi.

Keterkaitan peneliti dengan hasil penelitian Fatturahman (2016) Sistem hirarki mempengaruhi penerapan tipe ideal birokrasi. Struktur menurut Gibson (dalam Fatturahman 2016) merupakan alasan penting dari perilaku individual dan kelompok. Berikutnya pentingnya struktur organisasi sebagai sumber pengaruh sehingga diuraikan konsep bahwa struktur organisasi yang berfungsi untuk mengendalikan atau membedakan semua bagiannya. Dalam melaksanakan kebijakan publik harus ada struktur organisasi, artinya harus ada penjenjangan dan tanggung jawab diantara mereka yang terlibat dalam proses kebijakan publik, ada yang bertindak sebagai pimpinan dan ada yang bertindak sebagai staf, pelaksana, atau bawahan. Dengan adanya hirarki ini setiap orang terlibat dalam kegiatan usaha kerja sama dalam organisasi menjadi tahu, ia harus bertanggungjawab dan melapor kepada siapa. Hirarki ini akan mempermudah berlangsungnya proses koordinasi, pelaporan dan pengendalian.

Dari hasil penelitian pada Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa sistem hirarki sudah baik, ada struktur dalam organisasi pemerintahan desa Molas

sehingga membatasi dan memperjelas pekerjaan yang harus dilaksanakan, serta ada pula pengawasan dari langsung dari bapak kepala desa Molas sebagai bentuk evaluasi kerja bagi aparatur sehingga menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat. adapun evaluasi dilakukan secara mendadak atau tidak dijadwalkan sehingga aparatur pemerintah selalu merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang telah diberikan setiap hari. Evaluasi paling sederhana adalah evaluasi disiplin kerja bagi aparatur pemerintah desa Molas, dilakukan setiap saat, ketika ada yang tidak disiplin waktu lebih dari tiga kali, maka akan di berikan SP 1 sebagai sanksi bagi aparatur pemerintah desa Molas.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Pada Penerapan Tipe Ideal Birokrasi di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dilihat dari aspek: 1) pembagian kerja yang jelas, sudah diterapkan dengan baik, masing-masing aparat ditempatkan pada setiap struktur organisasi dengan pembagian kerja yang jelas. 2) Prinsip Hirarki, sudah diterapkan dengan baik daapat dilihat dari adanya struktur organisasi dalam sistem pemerintahan yang dibuat serta ada evaluasi dalam organisasi. 3) Hubungan Impersonal, sudah diterapkan dengan baik, tidak ada nepotisme, pelayanan dilakukan secara merata. 4) Pemilihan Personil Berdasarkan Karir, belum di terapkan sebab kualitas Sumber Daya Manusi DI Desa Molas masih kurang.

Pada Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Tipe Ideal Birokrasi di Kantor Desa Molas Kecamatan Bongomeme Kabupaten Gorontalo dilihat dari aspek 1) Sistem SOP, sudah diterapkan dengan baik, termasuk dalam pelayanan, sudah ada SOP pelayanan. 2) Sistem Kewenangan, Belum Cukup Baik, karena segala kewenangan memang ada pada masing-masing aparat akan tetapi dalam pengambilan keputusan, masih sepenuhnya dilakukan oleh kepala desa. 3) Sistem Hirarki, sudah diterapkan dengan baik, ada struktur organisasi dan ada pengawasan langsung.

### **Saran**

Pemerintah desa Molas diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat desa Molas termasuk pada bidang pendidikan agar kualitas sumber daya manusia di desa Molas mampu memadai sehingga bisa berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Mengusulkan agar pemberian kewenangan haruslah sepenuhnya pada sekretaris desa dan kepala-kepala bidang tidak hanya kewenangan dalam penyelesaian pekerjaan, tetapi juga kewenangan dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, agar pemerintah desa Molas tidak berjalan lambat dan berbelit-belit. Pemerintahan desa harus memperbaiki cara pemilihan pegawai aparatur pemerintah desa dengan melakukan rekrutmen sesuai berdasarkan karir, skil dan pengetahuan yang dimiliki oleh calon pelamar aparat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albrow, Martin, Birokrasi. 1996, *Terjemahan*. M. Rusli Karim. Yogyakarta: Tiara Wacana
- Agus Dwiyanto. 2011. Mengembalikan Kepercayaan Publik melalui Reformasi Birokrasi. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Kencana, 2014.
- Antasah, P. A. (2022). Menganalisis Program Kalimasada Kota Surabaya Dari Perspektif Prinsip Dasar Birokrasi Weberian. *Jurnal Pengabdian Nasional*, 02(06), 88–97.
- Dewi, R. C., & Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1)(1), 78–90.  
<https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.62>
- Endah, K., & Vestikowati, E. (2021). Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7, 647–656.  
<https://journals.unigal.ac.id/index.php/modrat/article/view/2491>
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor-faktor Keberhasailan Implementasi Kebijakan Publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14–27.
- Faradila, N., Ir. Yamin Siregar, M., & Dra. Isnaniah LKS, M. (2020). Pengaruh Pembagian Kerja Dan Wewenang Terhadap Kinerja Perawat Di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (Jimbi)*, 1(1), 141–150.
- Hardianti, H., Mustari, N., & Parawu, H. E. (2018). Pengaruh Impersonalitas terhadap Kepuasan Masyarakat di RSUD Syeh Yusuf Kabupaten Gowa. *Matra Pembaruan*, 2(2), 123–137.  
<https://doi.org/10.21787/mp.2.2.2018.123-137>
- Harsono, B. (2019). Analisis Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Johar Baru Kota Administrasi Jakarta Pusat. *Public Administration Journal*, 3(1), 20–38.
- Kadir, A. (2015). Prinsip-Prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik (PAJ))*, 3(1), 2013–2015.
- Kania, I., & Widiawati, W. (2019). Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Pegawai di UPTD Pasar Cisarupan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 10(02), 23-(2087–1511), 1–8.
- Nani, Y. N., Aneta, A., Abdussamad, Z., & Ilato, R. (2021). Bureaucratic Behavior Model In Policy Implementation To Enhace Equal And Extensive Education Access (The Departement Of Education And Culture Gorontalo Distric). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(14), 4073–4086.
- Ramadhanti, R. (2018). politik dan birokrasi pemerintah. *Jurnal Trias Politika*, Vol.2. No.
- Risnawan, W. (2019). *Manajemen Strategik Birokrasi Dalam Era "Disruption."*  
<https://nasional.sindonews.com/read/1270526>
- Rosmiati, I., & Kuraesin, A. D. (2021). Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Pt. Kunci Inti Transindo Jakarta. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 389–398.  
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.875>
- Saud, M.M. 2007. Sistem Adminitrasi Birokrasi Pemerintah. Jakarta Timur: Salemba
- Tohopi, R. (2019). Mewujudkan Good Governance Melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kota Gorontalo. *PROSIDING*, 10(3067).
- Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: Mandar Maju.